



BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA BINJAI



RENCANA KERJA
2025



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.



Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) ini berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2025, dan akan menjadi pedoman bagi seluruh ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai dalam melaksanakan tugasnya untuk Tahun 2025.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rencana Kerja ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai.

Wassalamu'alaikum wr,wb.

Binjai, Januari 2024

**Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Binjai**



RAHMAD FAUZI SALIM, SH, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19861126 200903 1 005



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seesuai dengan ketentuan Otonomi Daerah, bahwa Pemerintah Pusat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan tujuan antara lain mendekatkan pelayanan kepada masyarakat agar aspirasi kebutuhan masyarakat setempat dapat diakomodir dalam perencanaan pembangunan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut disusun Rencana Strategis Daerah dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai perencanaan kerja jangka menengah 5 (lima) tahun, yang dituangkan lagi dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk tahunan dan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tahunan dimasing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Perencanaan strategis sebagaimana diketahui merupakan rencana umum jangka menengah yang harus dijabarkan lebih lanjut dalam rencana tahunan agar sasaran dan program dapat dijalankan melalui kegiatan yang lebih terfokus dalam rangka pencapaian kinerja sasaran. Perencanaan Kerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Dalam dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi SKPD. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Untuk mewujudkan apa yang telah direncanakan maka rencana kerja yang telah ditetapkan disampaikan dan dibahas dalam forum SKPD dan Musrenbang guna diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya ditetapkan dalam APBD Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai tahun 2021 – 2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai Tahun 2021 – 2026 dengan tujuan yaitu :



- 1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara**
- 2. Meningkatnya tata kelola pelayanan kepegawaian**

Rencana Kerja ini nantinya dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai dan gambaran tentang Tugas Pokok dan Fungsi yang diwujudkan dalam bentuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai Tahun 2025.

Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi maka di bidang pemerintahan sekarang ini telah terjadi perubahan yang besar sekali, diantaranya adalah diwujudkannya tata pemerintahan yang transparan. Upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan, bersih dan berwibawa selalu menjadi obsesi bagi rakyat dan pemerintahan di zaman modern sekarang ini. Keterbukaan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang telah dicapai, diperlukan adanya perwujudan dan kemampuan serta kesungguhan Aparatur Sipil Negara untuk menjadi insan yang berkualitas, profesional dan bertanggung jawab dalam menangani berbagai permasalahan sehingga keberhasilan yang telah dicapai dapat terus dipelihara dan ditingkatkan serta diarahkan pada peningkatan Sumber Daya Manusia. Peningkatan SDM dan profesionalisme pada Aparatur Negara terus ditingkatkan guna mewujudkan Aparatur Negara yang dapat memberikan pelayanan kepada, masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai disusun berdasarkan beberapa landasan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pembangunan Daerah;



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 44);
20. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 2);
21. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 17);
22. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 18 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 18).

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai adalah sebagai upaya untuk mengarahkan seluruh kebijakan dalam penyelenggaraan urusan kepegawaian yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD guna dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan. Sedangkan tujuannya adalah agar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai dapat menyelenggarakan program dan kegiatannya dengan terarah, terkoordinasi dan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai, sesuai target kinerja yang telah direncanakan dalam waktu satu tahun



Penyusunan Renja juga dimaksudkan sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai dalam penyelenggaraan urusan kepegawaian serta untuk menilai suatu keberhasilan pada bidang kepegawaian dalam waktu satu tahun.

Dengan demikian penyusunan Renja dimaksudkan dan bertujuan untuk:

- a. Memberikan pedoman dan arah bagi pencapaian tujuan organisasi;
- b. Memberikan kejelasan terhadap kegiatan yang diprioritaskan;
- c. Memberikan tolak ukur secara kualitatif dan kuantitatif terhadap pencapaian tujuan;
- d. Memberikan kemudahan sebagai alat komunikasi maupun informasi;
- e. Memberikan kemudahan sebagai alat koordinasi terhadap perencanaan-perencanaan lainnya;
- f. Memberikan kemudahan dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban.

Diharapkan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Kota Binjai akan dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah Kota Binjai dalam menyusun RKPD Pemerintah Daerah Kota Binjai.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai Tahun 2023 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Binjai
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Binjai

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kepegawaian Daerah Kota Binjai Tahun 2023 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai

Proses penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai Ketentuan Undang-undang mengemukakan bahwa rancangan awal Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan penjabaran dari rencana strategi (Renstra) 2021-2026 SKPD dan akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dalam mengimplementasikan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023, ada 2 (dua) urusan dan 3 (tiga) program yang telah ditetapkan untuk dapat dilaksanakan oleh BKPSDM guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaksanaan masing-masing program tersebut direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan dan disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Binjai dan disahkan dalam APBD Kota Binjai pada setiap tahun anggaran.

Evaluasi program kerja tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai dilakukan pada setiap program kerja dengan periode waktu setiap berakhirnya kegiatan dalam satu tahun anggaran dan setiap akhir tahun anggaran. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan dimasa yang akan datang, dan dalam kaitannya dengan upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Binjai. Evaluasi difokuskan kepada keluaran (outputs), hasil (outcomes) dan dampak (impacts) kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai. Oleh karena itu, dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, harus disertai dengan penyusunan indikator kinerja pelaksanaan rencana. Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk memberikan:

1. Peningkatan akuntabilitas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai
2. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan



Sumber Daya Manusia Kota Binjai.

3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas sehingga akan lebih efektif, efisien dan responsif terhadap lingkungannya.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rancangan awal Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai tahun 2023 dan pencapaian target Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai dapat dijelaskan pada Tabel 2.1 berikut :



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM Kota Binjai dan Pencapaian Renstra BKPSDM Kota Binjai s/d Tahun 2023 Kota Binjai

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	2	3	4	5	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	1									
5 03	UNSUBSIDIARIS									
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
5 03 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
5 03 01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
5 03 01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
5 03 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
5 03 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
5 03 01	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
5 03 01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
5 03 01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
5 03 01	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
5 03 01	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai									

Kode	2	3	4	5	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 03 01	2.05	10	200	0	40	0	0%	0	0	0%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Sosialisasi	Pertemuan	Pertemuan	Pertemuan	Pertemuan		Pertemuan	Pertemuan	
5 03 01	2.06		100	100	100	149,53	150%	100	349,53	350%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	Persen	Persen	Persen	Persen		Persen	Persen	
5 03 01	2.06	01	6	1	1	1	100%	1	3	50%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi Listrik atau penerangan bangunan Kantor	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun		Tahun	Tahun	
5 03 01	2.06	02	6	1	1	1	100%	1	3	50%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun		Tahun	Tahun	
5 03 01	2.06	03	2	1	0	1	#DIV/0!	1	3	150%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun		Tahun	Tahun	
5 03 01	2.06	04	6	1	1	1	100%	1	3	50%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik Kantor	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun		Tahun	Tahun	
5 03 01	2.06	05	6	1	1	1	100%	1	3	50%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun		Tahun	Tahun	
5 03 01	2.06	06	6	1	1	1	100%	1	3	50%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun		Tahun	Tahun	
5 03 01	2.06	08	1050	285	160	570	356%	0	855	81%
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	Orang	Orang	Orang	Orang		Orang	Orang	
5 03 01	2.06	09	663	170	100	340	340%	105	615	93%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Orang	Orang	Orang	Orang		Orang	Orang	
5 03 01	2.07		100	100	100	100	100%	100	300	300%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Milik daerah	Persen	Persen	Persen	Persen		Persen	Persen	
5 03 01	2.07	05	5	1	1	1	100%	1	3	60%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeuler Kantor	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun		Tahun	Tahun	
5 03 01	2.08		100	100	100	233,3	233%	100	433,3	433%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang	Persen	Persen	Persen	Persen		Persen	Persen	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-2)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
5 01 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi atau Benda Pos Kantor	6 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	3 Tahun	300%	5 Tahun	11=(10/4)	
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	36 Bulan	300%	60 Bulan	83%	
5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	3 Tahun	50%	
5 03 01 2.09 01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik daerah	100 Set	100 Set	100 Set	150,77 Set	151%	350,77 Set	351%	
5 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan Dinas	91 Unit	23 Unit	13 Unit	46 Unit	354%	79 Unit	87%	
5 03 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Meubeler	5 Tahun	0 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	20%	
5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	3 Tahun	50%	
5 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor dan Gedung Lainnya	6 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	2 Tahun	33%	
5 03 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung	6 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	3 Tahun	50%	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-2)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n)		Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	RASIO KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN ASN	11 PERSEN	0 PERSEN	0,26 PERSEN	172,47 PERSEN	66336%	0,26 PERSEN	172,73 PERSEN	1570%	
5 03 02	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Cakupan pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN	100 Persen	100 Persen	100 Persen	170,4 Persen	170%	100 Persen	370,4 Persen	370%	
5 03 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Rencana Kebutuhan ASN	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	200%	0 Dokumen	3 Dokumen	60%	
5 03 02	Kordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Koordinasi	20 Pertemuan	0 Pertemuan	4 Pertemuan	0 Pertemuan	0%	0 Pertemuan	0 Pertemuan	0%	
5 03 02	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Pengadaan ASN	1217 Orang	556 Orang	283 Orang	1112 Orang	393%	355 Orang	2023 Orang	166%	
5 03 02	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Koordinasi Pemberhentian ASN	20 Orang	0 Orang	4 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%	
5 03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian	6 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	4 Aplikasi	400%	1 Aplikasi	6 Aplikasi	100%	
5 03 02	Pengelolaan Data Kepegawaian	Tersedianya data dan Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	200%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%	
5 03 02	Evaluasi data Informasi, dan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersedianya data Statistik Kepegawaian	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	
5 03 02	Mutasi dan Promosi ASN	Cakupan Promosi ASN	100 Persen	100 Persen	100 Persen	297,5 Persen	298%	100 Persen	497,5 Persen	498%	
5 03 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Kenaikan Pangkat ASN	5650 SK	1594 SK	850 SK	3188 SK	375%	626 SK	5408 SK	96%	
5 03 02	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Pelantikan Stunpah Jabatan ASN	83 Kegiatan	19 Kegiatan	15 Kegiatan	33 Kegiatan	220%	8 Kegiatan	60 Kegiatan	72%	
5 03 02	Pengembangan Kompetensi ASN	Cakupan Pengembangan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	76,19 Persen	76%	100 Persen	276,19 Persen	276%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-2)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n)		Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1													
5	03	02	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Jumlah ASN Mengikuti Ujian Dinas	300 Orang	300 Orang	80 Orang	80 Orang	160 Orang	200%	0 Orang	240 Orang	80%
				Jumlah ASN yang mengikuti Sumpah / Janji	1019 Orang	1019 Orang	165 Orang	165 Orang	330 Orang	200%	0 Orang	495 Orang	49%
				Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah	250 Orang	250 Orang	44 Orang	0 Orang	88 Orang	#DIV/0!	14 Orang	146 Orang	58%
5	03	02	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	31 Persentase	31 Persentase	1 Persentase	6 Persentase	8 Persentase	133%	1 Persentase	10 Persentase	32%
5	03	02	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	30 Pertemuan	30 Pertemuan	0 Pertemuan	6 Pertemuan	0 Pertemuan	0%	0 Pertemuan	0 Pertemuan	0%
5	03	02	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	380 Orang	380 Orang	0 Orang	150 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%
5	03	02	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan	200 Orang	200 Orang	0 Orang	30 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%
5	03	02	2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	145,8 Persen	146%	100 Persen	345,8 Persen	346%
5	03	02	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	60 Kegiatan	60 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	16 Kegiatan	133%	0 Kegiatan	28 Kegiatan	47%
5	03	02	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi pegawai	100 Orang	100 Orang	0 Orang	20 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%
5	03	02	05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	1000 Orang	1000 Orang	200 Orang	200 Orang	350 Orang	175%	0 Orang	550 Orang	55%
5	03	02	07	Pembinaan Disiplin	20 Kegiatan	20 Kegiatan	0 Kegiatan	4 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0%



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-2)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n)		Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
5 03 02	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
5 03 02	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Kasus yang Tertangani	54 Kasus	24 Kasus	12 Kasus	48 Kasus	400%	33 Kasus	105 Kasus	11=10/4	
5 03 02	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Izin Perceraian Pegawai	65 SK	15 SK	15 SK	25 SK	167%	21 SK	61 SK	94%	
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	INDEKS PROFESIONALITAS ASN	81 INDEKS	0 INDEKS	65 INDEKS	65 INDEKS	100%	68 INDEKS	133 INDEKS	164%	
5 04 02	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis	26 Persen	0 Persen	18,05 Persen	0 Persen	0%	20,05 Persen	20,05 Persen	77%	
5 04 02	Penyenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	26 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	#DIV/0!	18,5 Orang	18,5 Orang	71%	
5 04 02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Fungsional	29 Persen	6 Persen	5 Persen	178,4 Persen	3568%	5 Persen	189,4 Persen	653%	



Berdasarkan tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rancangan Awal Rencana Kerja dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2023, disimpulkan capaian kinerja target dan realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Dari 12 (tiga belas) kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023, telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran.

Adapun faktor Pendorong Pencapaian Keberhasilan Penyerapan Anggaran secara umum antara lain :

1. Ketepatan dalam Perencanaan Anggaran
2. Adanya monitoring dan Evaluasi secara berkala dalam penyerapan anggaran
3. Kecepatan SDM dalam Pengelolaan dan Penyelesaian Administrasi Keuangan
4. Adanya Sistem Manajemen Kinerja yang terarah dan terukur

Sementara faktor Penghambat Pencapaian Keberhasilan Penyerapan Anggaran secara umum sebagai berikut :

Tahap intervensi dan evaluasi tidak dapat terlaksana karena keterbatasan waktu penyelesaian sebagai akibat terlambat dimulainya kegiatan, sehingga ada anggaran yang telah direncanakan tidak dapat terserap sesuai target yang ditetapkan.

Sementara Capaian Realisasi tahun 2023 berdasarkan Laporan Evaluasi Triwulan sampai dengan akhir Tahun 2023 dapat dijelaskan bahwa :

a. Realisasi Belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai sampai dengan Tahun 2023

Capaian realisasi belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Dalam Tahun Anggaran 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai memiliki 2 Program dengan 12 kegiatan, alokasi maupun realisasi dari masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :



No.	KODE REKENING	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA SESUAI PAGU Rp.	REALISASI KEUANGAN KEUANGAN		SISA DANA (Rp.)
				(Rp)	(%)	
1	2	3	4	9	10	14
A	5.03	KEPEGAWAIAN	Rp. 5.636.089.563,00	4.909.528.232,00	87,11	717.071.331,00
I	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 4.868.410.873,00	4.292.685.432,00	88,17	566.235.441,00
1	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.612.537.277,00	3.232.424.708,00	89,48	380.112.569,00
1,1	5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 3.492.019.677,00	3.112.767.108,00	89,14	379.252.569,00
1,2	5.03.01.2.02.04	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 120.517.600,00	119.657.600,00	99,29	860.000,00
2	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 0,00	0,00	0,00	0,00
2,1	5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 0,00	0,00	0,00	0,00
3	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 394.110.840,00	361.511.533,00	91,73	32.599.307,00
3,1	5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 10.974.000,00	7.056.000,00	64,30	3.918.000,00
3,2	5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 0,00	0,00	0,00	0,00
3,3	5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 92.411.640,00	75.679.400,00	81,89	16.732.240,00
3,4	5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 57.547.200,00	51.196.600,00	88,96	6.350.600,00
3,5	5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 21.168.000,00	21.168.000,00	100,00	0,00
3,6	5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 4.110.000,00	0,00	0,00	4.110.000,00
3,7	5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 207.900.000,00	206.411.533,00	99,28	1.488.467,00
4	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 193.301.080,00	174.888.350,00	90,47	18.412.730,00
4,1	5.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Rp. 193.301.080,00	174.888.350,00	90,47	18.412.730,00
5	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 489.481.676,00	439.256.406,00	89,74	50.225.270,00
5,1	5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 5.820.000,00	3.339.200,00	57,37	2.480.800,00
5,2	5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 216.461.276,00	182.576.938,00	84,35	33.884.338,00
5,3	5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 267.200.400,00	253.340.268,00	94,81	13.860.132,00
6	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 178.980.000,00	84.604.435,00	47,27	84.885.565,00
6,1	5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 82.990.000,00	49.034.435,00	59,08	33.955.565,00
6,2	5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 32.050.000,00	12.250.000,00	38,22	19.800.000,00
6,3	5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 31.130.000,00	0,00	0,00	31.130.000,00
6,4	5.03.01.2.09.11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 32.810.000,00	23.320.000,00	71,08	9.490.000,00
II	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp. 767.678.690,00	616.842.800,00	80,35	150.835.890,00
1	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rp. 236.766.400,00	185.770.200,00	78,46	50.996.200,00
1.1	5.03.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Rp. 98.760.000,00	57.320.200,00	58,04	41.439.800,00
1.2	5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp. 44.266.400,00	43.840.000,00	99,04	426.400,00
1.3	5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Rp. 93.740.000,00	84.610.000,00	90,26	9.130.000,00
2	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Rp. 29.817.000,00	23.705.000,00	79,50	6.112.000,00
2.1	5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Rp. 0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Rp. 29.817.000,00	23.705.000,00	79,50	6.112.000,00
3	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Rp. 272.529.490,00	191.773.200,00	70,37	80.756.290,00
3.1	5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Rp. 68.369.490,00	17.313.200,00	25,32	51.056.290,00
3.2	5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Rp. 204.160.000,00	174.460.000,00	85,45	29.700.000,00
4	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp. 228.565.800,00	215.594.400,00	94,32	12.971.400,00
4.1	5.03.02.2.04.01	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Rp. 200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
4.2	5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Rp. 0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Rp. 0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Rp. 28.565.800,00	15.594.400,00	54,59	12.971.400,00
4,5	5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Rp. 0,00	0,00	0,00	0,00
B	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Rp. 358.075.440,00	181.413.600,00	50,66	176.661.840,00
III	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp. 358.075.440,00	181.413.600,00	50,66	176.661.840,00
1	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Rp. 83.427.400,00	42.076.100,00	50,43	41.351.300,00
1.1	5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 83.427.400,00	42.076.100,00	50,43	41.351.300,00
2	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rp. 274.648.040,00	139.337.500,00	50,73	135.310.540,00



No.	KODE REKENING	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA SESUAI PAGU Rp.	REALISASI KEUANGAN KEUANGAN		SISA DANA (Rp.)
				(Rp)	(%)	
1	2	3	4	9	10	14
2.1	5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Rp. 274.648.040,00	139.337.500,00	50,73	135.310.540,00
		JUMLAH.....	Rp. 5.994.165.003,00	5.090.941.832,00	84,93	893.733.171,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai

Sehubungan dengan kinerja pelayanan pemerintah daerah, Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, di dalam Pasal 11 ayat (4) menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Sebagaimana diketahui bahwa SPM adalah ketentuan tentang mutu pelayanan yang secara minimal harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dalam kurun waktu tertentu. Untuk urusan kepegawaian sebagaimana telah ditentukan dalam PP Nomor 38 Tahun 2007, sampai saat ini belum ada indikator urusan kepegawaian yang ditetapkan dalam bentuk SPM yang di atur dalam Peraturan Perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut sampai dengan saat ini BKD Kota Binjai mempunyai Standar Operasional Pelayanan (SOP).

Adanya kebijakan reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh pemerintah menghendaki adanya pembaharuan atau perubahan strategis di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian. Perubahan dibidang kepegawaian difokuskan pada pengembangan masalah sumber daya aparatur, mulai dari masalah perencanaan, rekrutmen dan seleksi pegawai, kinerja aparatur maupun masalah karir dan kesejahteraan serta disiplin aparatur.

Untuk peningkatan kualitas dan profesional Sumber Daya Aparatur dilaksanakan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada aparatur untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang program S1, S2 mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) serta peningkatan mentalitas dan prilaku SDM aparatur melalui pelatihan mengenai pembangunan karakter (character building).

Sedangkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepegawaian yang semakin cepat, tepat, valid, efektif dan efisien, baik kepada aparatur maupun kepada masyarakat, maka sistem pelayanan kepegawaian sudah harus di arahkan kepada penggunaan teknologi informasi yang dapat diterapkan pada penggunaan program Sistem



Informasi Kepegawaian dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian lainnya.



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Binjai

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Realisasi Capaian						Proyeksi		Catatan Analisis		
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2025 (n+2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)		Tahun 2025 (n+2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Indeks Profesionalitas ASN			55	65	68	71	75	44,28	72,56	71	75		
2	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah			57	60	62	65	67	62	2605	65	67		
3	Tersedianya Sistem Manajemen Kinerja ASN (SKP)			0	0	0	1	1	0	1	1	1		
4	Ratio ketersediaan dan kebutuhan ASN			10	11	11,5	12	12,5	15	57,14	12	12,5		
5	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural			55	57	60	63	65	30,36	0	63	65		
6	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis			3	3	4	5	6	3,6	2,94	5	6		
7	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional			3	3	4	5	6	0	0	5	6		
8	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan formal			0,12	0,15	0,2	0,25	0,3	2,46	0,2	0,25	0,3		
9	Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai kompetensi			55,13	60,34	66,93	72,2	77,47	30,36	97,8	72,2	77,47		
10	Persentase pelanggaran disiplin ASN			0,17	0,16	0,15	0,14	0,13	0,46	0,73	0,14	0,13		
11	Jumlah jabatan fungsional bersertifikat kompetensi			100	100	100	100	100	100	100	100	100		



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai

Berkaitan dengan peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang kepegawaian, Isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Belum optimalnya SDM dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik
2. Belum optimalnya pemanfaatan kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya
3. Masih rendahnya jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti Diklat kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan yakni sebesar 16,48 % dari jumlah pejabat yang ada.
4. Masih rendahnya jumlah ASN yang mengikuti diklat terknis dan fungsional.
5. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman ASN dalam menyusun dan melaporkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perencanaan Kerja merupakan proses penjabaran dari tujuan dan sasaran dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD untuk lima tahunan, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatantahunan.

Berdasarkan rancangan awal RKPD yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Binjai, maka telah disusun Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai, yang telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana terdapat di dalam Renstra SKPD yang telah ditetapkan. Penetapan program, kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut dalam renstra SKPD, selain didasarkan pada kebutuhan pegawai juga didasarkan pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan/diatur dalam peraturan perundangan-undangan, yaitu Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Dalam pelaksanaan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai tahun 2025, program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan merupakan program dan kegiatan yang telah diusulkan dalam rancangan awal RKPD melalui forum SKPD dan Musrenbang, sehingga tidak ada jenis program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang baru/berbeda. Adanya perbedaan dari



jumlah anggaran yang diusulkan dan yang disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).



**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai**

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Binjai	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah	100%	6.492.555.510,00	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Binjai	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah	100%	4.868.410.873,00	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Binjai	Cakupan Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja	100%	14.609.200,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Binjai	Cakupan Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja	100%	0,00	
3	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Binjai	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	100%	4.357.453.150,00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Binjai	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	100%	3.612.537.277,00	
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Kota Binjai	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	100%	136.600.000,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Kota Binjai	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	100%	0,00	
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Binjai	Cakupan Layanan Administrasi Umum	100%	788.325.280,00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Binjai	Cakupan Layanan Administrasi Umum	100%	394.110.840,00	
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Binjai	Cakupan Barang Milik Daerah	100%	506.000.000,00	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Binjai	Cakupan Barang Milik Daerah	100%	193.301.080,00	
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Binjai	Cakupan Jasa Penunjang	100%	323.537.240,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Binjai	Cakupan Jasa Penunjang	100%	489.481.676,00	
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Binjai	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	366.030.640,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Binjai	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	178.980.000,00	



NO	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Program Kepegawaian Daerah	Kota Binjai	Rasio Ketersediaan Dan Kebutuhan ASN	0,26%	3.326.473.824,00	Program Kepegawaian Daerah	Kota Binjai	Rasio Ketersediaan Dan Kebutuhan ASN	15%	767.678.690,00	
10	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kota Binjai	Cakupan Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi ASN	100%	1.275.315.168,00	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kota Binjai	Cakupan Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi ASN	100%	236.766.400,00	
11	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Kota Binjai	Cakupan Promosi ASN	100%	131.483.456,00	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Kota Binjai	Cakupan Promosi ASN	100%	29.817.000,00	
12	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Kota Binjai	Cakupan Pengembangan Kompetensi	100%	1.613.000.000,00	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Kota Binjai	Cakupan Pengembangan Kompetensi	100%	272.529.490,00	
13	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Binjai	Cakupan Penilaian Dan Evaluasi Kinerja	100%	306.675.200,00	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Binjai	Cakupan Penilaian Dan Evaluasi Kinerja	100%	228.565.800,00	
14	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kota Binjai	Indeks Profesionalitas ASN	65	4.237.252.000,00	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kota Binjai	Indeks Profesionalitas ASN	100%	358.075.440,00	
15	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Kota Binjai	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan DAN Pelatihan Teknis	18,5%	1.424.800.000,00	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Kota Binjai	Persentase ASN yang	100,0%	83.427.400,00	
16	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kota Binjai	Persentase Pejabat ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural, Fungsional Teknis	5%	2.812.452.000,00	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kota Binjai	Persentase Pejabat ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural, Fungsional Teknis	100%	274.648.040,00	



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai sebagai tindak lanjut dan implementasi serta penjabaran dari kebijakan Pemerintah Kota Binjai di bidang kepegawaian sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD, hanya akan dapat dicapai apabila dilakukan penyusunan perencanaan strategis yang tepat dalam program dan kegiatan yang harus dilaksanakan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kota Binjai dan mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD, penetapan program dan kegiatan dalam pelaksanaan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai, hanya mengacu pada program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan nasional (Pemerintah Pusat) dalam bidang kepegawaian melalui Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara, BKD Provsu dan BPSDM Provsu. Dengan demikian, tidak ada usulan program dan kegiatan yang berasal dari para Pemangku Kepentingan, seperti LSM, asosiasi-asosiasi, ataupun Perguruan Tinggi maupun SKPD Kabupaten/Kota.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam mencapai Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai Tahun 2025, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai Tahun 2021 – 2026 untuk program dan kegiatan di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Membangun Budaya Kepegawaian yang Unggul;
2. Membangun Budaya Pelayanan Kepegawaian yang tulus dan ikhlas;
3. Mewujudkan Dokumen Kepegawaian yang Akurat;
4. Mewujudkan Tata Kepegawaian yang Harmonis dan Akurat;
5. Mewujudkan Pelayanan Kepegawaian yang Cepat, Tepat, Mudah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai

Sasaran ditetapkan untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan organisasi (SKPD) yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu membantu Walikota dalam bidang kepegawaian meliputi Bidang Pengadaan dan Mutasi pegawai, pengangkatan dan penggajian, pengembangan, pemberhentian, dan pensiun pegawai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tugas lain yang diberikan Walikota. Sesuai dengan Visi Walikota Binjai yaitu “ ***Mewujudkan Binjai yang lebih maju, Berbudaya dan Religius***” dimana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai melaksanakan misi yang pertama, yaitu “**Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional**, misi pertama ini mempunyai pengertian bahwa segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, melayani dan dapat dipercaya dalam mengemban amanat masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselaraskan dengan Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai yaitu;



1. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara
2. Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan kepegawaian.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya yang membantu Walikota dalam bidang kepegawaian meliputi bidang pengadaan dan mutasi pegawai, pengangkatan dan penggajian, pengembangan, pemberhentian, dan pensiun pegawai membuat program dan rencana kegiatan.

Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Straregi	Kebijakan
1.	Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	1. Meningkatnya keikut sertaan ASN mengikuti Diklat Kompetensi, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional	a. Menjalin kerjasama dengan Lembaga Diklat Terakreditasi b. Meningkatkan Kapasitas lembaga diklat	a. Melaksanakan Diklat Kompetensi, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional serta Diklat Prajabatan dengan pola Fasilitasi b. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Diklat c. Menambah WI d. Akreditasi Lembaga Diklat
		2. Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman ASN dalam menyusun dan melaporkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	a. Meningkatkan pembinaan dan evaluasi dalam menyusun SKP	a. Membentuk Tim Penilai Kinerja b. Membangun Aplikasi e- Kinerja c. Melaksanakan Sosialisasi/ Bimtek Manajemen Kinerja
		3. Meningkatnya minat ASN dalam meningkatkan Pendidikan Formal	a. Menjalin kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi b. Meningkatkan biaya bantuan tugas belajar.	a. Mengirim ASN mengikuti Tugas belajar b. Memberikan kesempatan yang sama kepada ASN untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan melalui Izin Belajar
		4. Menurunnya persentase pelanggaran disiplin ASN	a. Meningkatkan pembinaan Disiplin ASN b. Peningkatan kualitas SDM aparatur yang bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme melalui penegakan peraturan disiplin dan kode etik perilaku ASN	a. Melaksanakan sosialisasi Pembinaan Disiplin ASN b. Memberikan reward dan punishment kepada ASN



2.	Meningkatkan Tata kelola Pelayanan kepegawaian	5. Meningkatkan kualitas pelayanan Kepegawaian	a. Menyediakan pelayanan kepegawaian secara terpadu b. Membuat survey kepuasan pelayanan	a. Membuat tempat pelayanan kepegawaian, konsultasi dan informasi. b. Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur yang mendukung pelayanan kepegawaian c. Hasil survey untuk pelayanan kepegawaian
		6. Meningkatnya kualitas informasi kepegawaian	a. Sinkronisasi database antara pemerintah pusat, provinsi dan Pemerintah Kota Binjai melalui pengembangan aplikasi berbasis web/internet. b. Peremajaan data yang terprogram setiap tahunnya c. Verifikasi database yang terencana dalam mendukung web site Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai dan Koneksi Sistem informasi Kepegawaian agar terintegrasi dengan data Provinsi dan BKN d. Sistem database Kepegawaian yang terintegrasi secara elektornik keseluruhan Perangkat Daerah dilingkungan Pemko Binjai	a. Pengembangan Aplikasi Kepegawaian sesuai dengan perkembangan dan perubahan Teknologi informasi b. Peningkatan kapasitas SDM yang langsung menangani sistem informasi kepegawaian c. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja system informasi d. Optimalisasi jaringan yang mendukung kelancaran up dating database, serta kerjasama dengan instansi terkait dalam penyediaan server database dan verifikasi database yang dapat mendukung web site Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai e. Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur yang mendukung Sistem Informasi kepegawaian f. Membentuk Tim percepatan pelaksanaan pengelola Sistem Informasi Kepegawaian



3.1 Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai

Secara umum program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Adapun Program Renja BKD Kota Binjai tahun 2025 adalah :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- B. Program Kepegawaian Daerah
- C. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja BKD Kota Binjai tahun 2025 adalah :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
 - a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - b. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - d. Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - e. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan rumah tangga
 - d. Penyediaan bahan logistic kantor



- e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
- g. Fasilitasi kunjungan tamu
- h. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan :
 - a. Pengadaan kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - b. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - c. Pengadaan Mebel
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan Peralatan rumah tangga
 - d. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - b. Pemeliharaan Mebel
 - c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - d. Pemeliharaan asset tetap lainnya
 - e. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
 - f. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.

B. Program Kepegawaian Daerah

1. Kegiatan Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian dengan Sub Kegiatan:
 - a. Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN
 - b. Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK
 - c. Evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan ASN
 - d. Perumusan bahan kebijakan pemberhentian ASN
 - e. Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian
 - f. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian



- g. Pengelolaan data kepegawaian
- h. Evaluasi data, informasi dan system informasi kepegawaian
- 2. Kegiatan Mutasi dan promosi ASN dengan Sub Kegiatan :
 - a. Pengelolaan kenaikan pangkat ASN
 - b. Pengelolaan promosi ASN
- 3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN dengan Sub Kegiatan :
 - a. Peningkatan kapasitas kinerja ASN
 - b. Pengelolaan Assesment center
 - c. Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN
 - d. Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat
 - e. Fasilitasi sertifikasi fungsional ASN
 - f. Fasilitasi pengembangan karier dalam jabatan fungsional
- 4. Kegiatan Penelaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
 - b. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
 - c. Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai
 - d. Pengelolaan tanda jasa bagi pegawai
 - e. Pembinaan disiplin ASN
 - f. Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN
 - g. Pelayanan proses izin perceraian pegawai

C. Program Pengembangan Sumber daya manusia

- 1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara Urusan Pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum.
- 2. Kegiatan Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan Kompetensi Manajerial dan fungsional dengan Sub Kegiatan :
 - a. Pengelolaan lembaga sertifikasi penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota
 - b. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dioperasionisasikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, telah merubah pola penelitian yang ada. Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Penelitian Pembangunan Nasional.

Keterpaduan proses penelitian ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses penelitian. Indikasi dari persoalan tersebut adalah kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah penelitian pembangunan yang dapat direalisasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama ini.

Guna mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk program dan kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk menuju kearah yang lebih baik lagi, bukan sekedar kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi yang membantu Kepala Daerah dalam Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.

Sesuai dengan identifikasi kebutuhan anggaran pada tahun 2025 dan mengacu kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya, maka untuk tahun anggaran 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai telah menyusun sebanyak 3 program dan 13 kegiatan. Program yang disusun



sesuai dengan program prioritas yang telah ditetapkan serta untuk mencapai indikator dan target program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai yang telah ditentukan. Total usulan Belanja Langsung pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai yang diusulkan pada tahun anggaran 2025 melalui dana APBD Pemerintah Kota Binjai, untuk pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 13,551,529,092,-. Perhitungan anggaran tahun 2025 tersebut sudah didasarkan kepada usulan dan kebutuhan program dan kegiatan dari masing-masing bidang yang ada di BKD Kota Binjai, terutama kebutuhan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BKD yaitu memberikan pelayanan dibidang kepegawaian. Setelah melalui pembahasan Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah bersama Bappeda Kota Binjai, untuk pagu usulan alokasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai Tahun 2025 meningkat 126% dari anggaran tahun 2023.



BAB IV

PENUTUP

Rancangan awal Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai yang disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD), Rencana Strategik (Renstra), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, memuat program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsi badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran (indikator), hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai Tahun 2025 dimaksud sebagai dokumen rencana kerja yang mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat (Pegawai Negeri Sipil) sesuai kesepakatan yang dicapai dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahunan.

Ranwal Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai 2025 diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai untuk 2025.

Selain itu, penyusunan Rencana Awal Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai Tahun 2025 merupakan penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai, nantinya menjadi dasar Evaluasi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahunan. Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai tahun 2025 semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun-tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Rencana kerja tahunan merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan SKPD yang berkontribusi untuk



pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis SKPD. Rencana kerja dibuat terkait dengan tujuan organisasi untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan SKPD.

Rencana Strategis (Renstra) sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang nantinya dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Evaluasi Pencapaian Kinerja tahunan yang diwujudkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai. Dengan adanya Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai diharapkan akan memberikan gambaran tentang apa yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai untuk tahun 2025.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai selama Tahun Anggaran 2025, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban Tujuan Organisasi untuk menuju Aparatur Pemerintah yang professional, bersih dan berwibawa sebagai pelayan masyarakat yang terbaik.

Demikianlah Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai Tahun 2025, sebagai acuan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai selama Tahun 2025 yang didasarkan kepada Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai tahun 2021-2026. Mudah mudahan apa yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

Binjai, Januari 2024

**Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Binjai**



RAHMAD FAUZI SALIM, SH, M.AP
PEMBINA

NIP. 19861126 200903 1 005



Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Binjai

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026						
		Capaian Program	Kehadiran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Catatan Penting	Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Kehadiran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	
5		UNSTRUKTUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KOTA BINJAI											
5		KEPEGAWAIAN											
5		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA											
5	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							23.648.511	6.614.443.241			6.852.860.909
5	01	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria			0 Dokumen		7.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		
5	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria			1 Dokumen		9.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		9.500.000
5	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria			1 Laporan		7.148.511	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7.434.451
5	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4.713.021.327	4.713.021.327			4.901.542.180
5	01	Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria			42 orang bulat		4.568.025.338	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4.542.746.560
5	01	Pelaksanaan Penunjabatan dan Pengukuran Verifikasi Keseluruhan SKPD		Jumlah Dokumen Penunjabatan dan Pengukuran Verifikasi Keseluruhan SKPD	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria			1 Dokumen		344.995.789	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		358.795.670
5	01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							172.746.560	172.746.560			153.656.422
5	01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Sarana dan Prasarana	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria			1 Paket		25.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0
5	01	Pengelolaan Palanan Dinas Berserta Akibat Kelangkaannya		Jumlah Paket Palanan Dinas Berserta Akibat Kelangkaannya	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria			1 Paket		44.904.560	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		46.794.342
5	01	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria			1 Dokumen		32.448.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		33.745.920
5	01	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Binjai, Binjai Kota, Satria			1 Dokumen		19.685.120	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		20.472.525



Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025			Praktikan Maju Rencana Tahun 2026			
			Koharian Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana	Catanan Penting	Target Capaian Kinerja	
							Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolak Ular	Target
5 03 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kota Binjai, Binjai Kota, Sarria		40 orang		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			52.643.635	
5 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangant Daerah							798.572.623			830.515.528	
5 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Binjai, Binjai Kota, Sarria		1 Paket		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			13.453.373	
5 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Binjai, Binjai Kota, Sarria		2 paket		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			179.978.240	
5 03 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Binjai, Binjai Kota, Sarria		1 Paket		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	
5 03 01 2.06 04	Penyediaan BAHAN Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Binjai, Binjai Kota, Sarria		12 Paket		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			106.515.622	
5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Binjai, Binjai Kota, Sarria		12 Paket		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			84.522.281	
5 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Binjai, Binjai Kota, Sarria		22 Dokumen		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			24.312.001	
5 03 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Binjai, Binjai Kota, Sarria		1 Laporan		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			12.283.515	
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Binjai, Binjai Kota, Sarria		1 Laporan		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			409.450.496	
5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							168.729.690			175.478.784	
5 03 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas /Jabatan yang Disediakan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas /Jabatan yang Disediakan	Kota Binjai, Binjai Kota, Sarria		1 Unit		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	
5 03 01 2.07 05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Binjai, Binjai Kota, Sarria		1 Paket		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			175.478.784	
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							349.957.879			363.935.394	
5 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Binjai, Binjai Kota, Sarria		1 Laporan		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			6.434.222	
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Binjai, Binjai Kota, Sarria		1 Laporan		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			256.199.025	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Kedua Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Cataan Penting	Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan	Totok Ular	Target
5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penelitian Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disudikan		Kota Binjai, Binjai Kota, Saria	1 Laporan					101.302.147
5 03 01 2.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										410.798.210
5 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Kota Binjai, Binjai Kota, Saria	13 Unit					128.684.442
5 03 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara		Kota Binjai, Binjai Kota, Saria	24 Unit					8.773.939
5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kota Binjai, Binjai Kota, Saria	24 Unit					48.136.680
5 03 01 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		Kota Binjai, Binjai Kota, Saria	1 Unit					7.500.000
5 03 01 2.09 09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi		Kota Binjai, Binjai Kota, Saria	2 Unit					175.478.784
5 03 01 2.09 11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi		Kota Binjai, Binjai Kota, Saria	1 Unit					42.221.365
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH										2.516.314.088
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberitahuan dan Informasi Kepegawaian ASN										1.350.191.321
5 03 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Kota Binjai, Binjai Kota, Saria	1 Dokumen					81.890.099
5 03 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Kota Binjai, Binjai Kota, Saria	1 Dokumen					40.945.050
5 03 02 2.01 04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN		Kota Binjai, Binjai Kota, Saria	1 Laporan					994.379.776
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pembentukan		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pembentukan		Kota Binjai, Binjai Kota, Saria	1 Dokumen					52.643.635



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025			Praktikum Maju Rencana Tahun 2026		
			Koharian Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikator (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Kota Binjai, Budget Kota, Satria	1 Dokumen		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		81.120.000	0
5 03 02 2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian		Kota Binjai, Budget Kota, Satria	1 Dokumen		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		153.711.766	159.800.236
5 03 02 2.01 12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		Kota Binjai, Budget Kota, Satria	1 Laporan		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		19.685.120	20.472.525
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN									142.212.506	147.901.007
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenalokan Pengkat ASN		Jumlah Pengelolaan Kenalokan Pengkat ASN		Kota Binjai, Budget Kota, Satria	1 Laporan		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		81.521.594	84.782.458
5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		Kota Binjai, Budget Kota, Satria	1 Dokumen		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		60.690.912	63.118.549
5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN									663.020.800	689.541.632
5 03 02 2.03 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN		Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya		Kota Binjai, Budget Kota, Satria	464 orang		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		89.989.120	93.588.685
5 03 02 2.03 02	Pengelolaan Asesment Center		Jumlah Dokumen Pengelolaan Asesment Center		Kota Binjai, Budget Kota, Satria	1 Dokumen		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0	0
5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola		Kota Binjai, Budget Kota, Satria	1 Dokumen		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		472.442.880	491.340.595
5 03 02 2.03 05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Didlat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Didlat		Kota Binjai, Budget Kota, Satria	1 Dokumen		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		56.243.200	58.492.928
5 03 02 2.03 10	Fasilitas Sertifikasi Fungsional ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Fungsional ASN		Kota Binjai, Budget Kota, Satria	230 orang		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		16.274.000	16.871.960
5 03 02 2.03 14	Fasilitas Pengembangan Karir dalam Abstrak Fungsional		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Karir dalam Abstrak Fungsional		Kota Binjai, Budget Kota, Satria	1 Dokumen		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		28.121.600	29.246.464
5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									331.699.896	344.937.892
5 03 02 2.04 02	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Kota Binjai, Budget Kota, Satria	1 Dokumen		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		61.867.520	64.312.221
5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Perubahan Penghargaan Bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		Kota Binjai, Budget Kota, Satria	20 Orang		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		168.729.600	175.478.784



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
			Kehadiran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Target Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	
												Tolok Ukur	Target
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa		Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	300 Orang		28 684.032	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum			29 831.393	
5 03 02 2.04 05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	40 Orang		28 121.600	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum			29 246.464	
5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	1 Laporan		35 860.664	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum			37 295.091	
5 03 02 2.04 08	Pengelolaan, Penyelesaian, dan Pelaksanaan Disiplin ASN		Jumlah Dokumen Proses Izin Perencanaan Pegawai yang Dilyakan		Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	1 Dokumen		8 436.680	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum			8 773.939	
5 03 02 2.04 09	Pelayanan Proses Izin Perencanaan Pegawai												
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							4.420.771.763				4.597.602.634	
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							4.420.771.763				4.597.602.634	
5 04 02 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis							1.541.063.680				1.602.706.227	
5 04 02 2.01 03	Penyenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Intri, dan Pimpinan bagi Jabatan Administrasi, Penyelenggara Urusan Pemerintahan Kombarek, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi		Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	280 orang		1 541 063 680	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum			1 602 706 227	
5 04 02 2.02	Sertifikasi, Kelenbagan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional							2.879.708.083				2.994.896.407	
5 04 02 2.02 02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terakreditasi dengan Baik		Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	1 Lembaga		0	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum			0	
5 04 02 2.02 07	Penyenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Puncutan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Keperencanaan, dan Prajabatan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Puncutan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Keperencanaan, dan Prajabatan		Kota Binjai, Binjai Kota, Satria	5 Laporan		2 879 708 083	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum			2 994 896 407	
TOTAL								13.551.529.092				13.983.085.455	



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA BINJAI**

**Jalan WR. Mongonsidi No. 24,
Kelurahan Satria, Keca. Binjai Kota
Binjai 20714**